

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan memegang peranan sangat penting, khususnya di wilayah pedesaan. Keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemajuan pembangunan di tingkat paling dasar, yaitu pembangunan pedesaan (Pratama *et al.*, 2023). Pada akhir tahun 2019 Indonesia menghadapi pandemi covid-19 yang membawa dampak signifikan bagi desa, menambah beban dalam mengelola perekonomian yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa (Ayu Lestary *et al.*, 2022). Hal ini juga menghambat partisipasi aktif dalam pembangunan desa serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada awal terjadinya covid-19 sampai tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2024

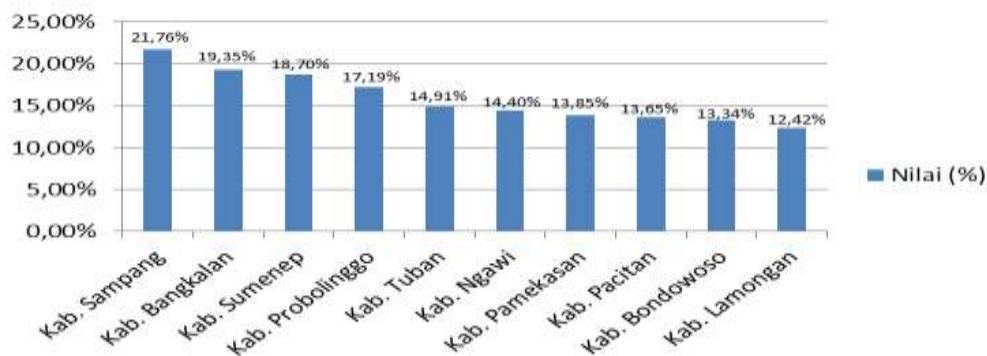
Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin 2019-2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diatas, pada tahun 2019 sampai 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami naik turun. Awalnya, angka kemiskinan cukup rendah dan stabil. Namun, saat pandemi COVID-19 terjadi pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Ekonomi masyarakat terganggu, terutama yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil dan buruh harian. Setelah pandemi mulai mereda pada tahun 2021 kondisi ekonomi mulai membaik hingga September 2024.

Mengacu pada data tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pada saat covid-19 sampai sekarang khususnya di wilayah pedesaan, dengan beragam program bantuan sosial. Program yang dilaksanakan yaitu Program Desa Berdaya yang dilaksanakan pada tahun 2021 sejak covid-19 dan terus berjalan sampai saat ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Sampang merupakan suatu wilayah yang berada di bagian timur laut Pulau Jawa, tepatnya di Pulau Madura. Kabupaten ini memiliki luas 1.233,3 km² dan terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, serta 180 desa. Sebagai daerah agraris di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang memiliki kekayaan sumber daya alam serta beragam potensi wisata, termasuk wisata alam, budaya, dan religi. Kabupaten Sampang memiliki berbagai potensi ekonomi, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Meskipun memiliki beragam potensi, daerah ini masih menghadapi tantangan terkait masyarakat yang hidup di bawah batas kemiskinan. Hal ini sejalan dengan permasalahan kemiskinan yang umum

dialami oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Berikut ini merupakan data wilayah dengan jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS):



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi di Jawa Timur Pada Maret 2023

Berdasarkan data BPS tahun 2023, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sampang menduduki angka penduduk miskin no 1 di Jawa Timur pada tahun 2023 dengan nilai 21,76% penduduk miskin. Hal tersebut salah satunya dapat diatasi melalui Program Desa Berdaya yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa melalui inovasi dan optimalisasi sumber daya lokal serta mempertegas legalisasi status desa mandiri, nantinya desa yang telah mandiri diharapkan mampu bersaing sekaligus meraih keunggulan untuk mempertahankan keberlanjutan capaian desa mandirinya. Sehingga dapat berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) Desa.

Program Desa Berdaya merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2025-2030, yaitu “Jatim Sejahtera.” Program ini bertujuan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di desa dan kota

dengan menerapkan pendekatan terpadu yang mencakup berbagai sektor dan wilayah. Selain itu, Program Desa Berdaya juga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada pengembangan desa tematik, dengan menitikberatkan kreativitas, inovasi, serta produktivitas berbasis BUM Desa guna memperkuat perekonomian lokal (Sasmita *et al.*, 2024). Melalui pendekatan ini, diharapkan setiap desa mampu menggali potensi unggulannya secara maksimal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun tujuan strategis program desa berdaya yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan kemandirian ekonomi desa adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pengembangan inovasi produk, baik barang maupun jasa, yang berbasis pada potensi serta sumber daya lokal secara kreatif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
2. Menghadirkan produk ikonik yang khas dari setiap desa, berbasis inovasi lokal yang diperkuat melalui *economic branding*.
3. Memaksimalkan pemanfaatan dana desa guna memperkuat identitas desa yang berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menciptakan praktik keteladanan (*good practices*) yang dapat menjadi inspirasi bagi desa lainnya.

Salah satu upaya pemerintah dalam mempertegas legalisasi status desa mandiri yaitu desa yang telah mandiri diharapkan mampu bersaing sekaligus meraih keunggulan untuk mempertahankan keberlanjutan capaian desa

mandirinya. Konsep Program Desa Berdaya akan serupa dengan pola pengembangan program desa mandiri, karena memang salah satu tujuan Program Desa Berdaya adalah untuk melanjutkan perkembangan jumlah desa mandiri di Provinsi Jawa Timur (Fatmawati, 2023). Jadi, program ini bukan hanya untuk menaikkan status desa, tapi juga untuk menjaga pembangunan dengan meningkatkan kemampuan warga dan memanfaatkan potensi desa secara mandiri.

Desa yang telah mencapai status kemajuan dan kemandirian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan reward sebesar Rp 100.000.000,00, dengan alokasi dana sebagai berikut: 90% ditujukan untuk pengembangan produk barang atau jasa inovatif dalam program desa tematik (ikonik) melalui pendekatan economic branding, sedangkan 10% dialokasikan untuk kebutuhan operasional desa (Ayu Lestary *et al.*, 2022). Pemberian bantuan ini dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran memiliki peran penting dalam pembangunan di suatu desa, semua kegiatan dan program yang telah direncanakan sangat membutuhkan dorongan dana untuk mampu diwujudkan.

Pada tahun 2022 Program Desa Berdaya dilaksanakan di Kabupaten Sampang dengan tiga desa yang berstatus Desa Mandiri, yaitu Desa Banyuates, Desa Pangarengan, dan Desa Jelgung. Penetapan status tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Desa Nomor 80 Tahun 2022. Dengan ditetapkannya sebagai desa mandiri ketiga desa tersebut juga mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Berdaya sejumlah Rp. 100.000.000, karena telah berstatus sebagai desa mandiri. Syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut dapat diperoleh apabila desa telah berstatus mandiri yang ditentukan

melalui tiga indikator nilai Indeks Desa Mandiri (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) serta telah sesuai dengan Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2023. Adapun data desa mandiri dan penerima bantuan Program Desa Berdaya di Kabupaten Sampang terhadap capaian *SDGs* Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penerima Progran Desa Berdaya dan Skor *SDGs* Desa

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM 2022	Status IDM 2022	Skor <i>SDGs</i> Desa
1.	Pangarengan	Pangarengan	0,8229	0,8500	0,8667	0,8465	Mandiri	45,33
2.	Robatal	Jelgung	0,7657	0,8833	0,8000	0,8163	Mandiri	48,10
3.	Banyuates	Banyuates	0,9029	0,9333	0,8667	0,9010	Mandiri	45,11

Sumber Data : DPMD Kabupaten Sampang 2022 dan Kemendesa 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pembangunan pedesaan di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan perekonomian, menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa,serta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs* Desa). Skor *SDGs* Desa di ketiga desa tersebut menunjukkan variasi dalam tingkat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Desa Jelgung memiliki capaian tertinggi, sedangkan Desa Pangarengan memiliki skor terendah. Capaian tersebut sejajar dalam dengan Program Desa Berdaya.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui Program Desa Berdaya yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi desa (Natalia & Maulidya, 2023). Dalam mendukung keberhasilan *Sustainable*

Development Goals (SDGs) Desa, pemerintah telah menetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Regulasi ini mengarahkan pengembangan konsep *SDGs Desa* sebagai langkah lanjutan dalam pembangunan yang berfokus pada tingkat desa. *SDGs Desa* merupakan adaptasi dari *SDGs* global dengan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual terhadap kebutuhan serta potensi desa di Indonesia. Konsep ini dirancang untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan pembangunan di tingkat lokal (Iskandar, 2020).

Penerapan *SDGs Desa* memiliki peran strategis dalam upaya pencapaian tujuan *SDGs* global di Indonesia pada tahun 2030. Hal ini karena desa menjadi unit pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa yang maju bukan hanya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, namun juga memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta penguatan ekonomi berkelanjutan (Fatmawati, 2023). Dalam *SDGs Desa* terdapat 18 tujuan yang menjadi target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat desa. Berikut adalah 18 tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) Desa :



Sumber : *SDGS UB KEMENDES 2025*

Gambar 1. 3 Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada gambar 1.1 terdapat tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan Program Desa Berdaya, salah satunya yaitu :

1. *SDGs* ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata : Perekonomian yang tumbuh secara merata merupakan faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Desa harus menjadi lingkungan di mana setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya.
2. *SDGs* ke-9 yaitu berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.: Infrastruktur dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat desa menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup akses jalan yang layak, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. *SDGs* ke-10 yaitu yaitu desa tanpa kesenjangan : Kesenjangan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, perlu diatasi guna mewujudkan masyarakat yang harmonis. Dengan menanamkan prinsip keadilan dan kesetaraan, desa diharapkan menjadi lingkungan di mana setiap warganya merasa dihormati dan memiliki kesempatan yang setara.

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Desa Berdaya. Peraturan ini mengatur pedoman umum pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Adanya program tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam menjalankan pembangunan yang selaras dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Maka, penting untuk mengukur efektivitas

program demi mendapatkan hasil berupa nilai capaian tujuan dan sasaran program yang telah terlaksana.

Dalam menganalisis suatu keberhasilan Program Desa Berdaya yang selaras dengan *SDGs* Desa maka diperlukan melalui pengukuran efektivitas pada Program Desa Berdaya. Suatu program dikatakan efektif jika perbandingan tingkat pencapaian tujuan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya menuai hasil yang sesuai. Efektivitas berhubungan dengan sumber daya manusia atau organisasi yang mencapai visi, misi, dan nilai yang telah disepakati bersama (Fatmawati, 2023). Efektivitas pada Program Desa Berdaya mengacu pada sejauh mana proses pemberdayaan berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk mengendalikan dan meningkatkan kehidupan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam pembangunan desa, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dan berbagai pihak meluncurkan Program Desa Berdaya sebagai salah satu upaya untuk mendorong kemajuan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial di desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Program Desa Berdaya dalam membantu pencapaian tujuan *SDGs* Desa di Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seberapa efektif Program Desa Berdaya dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Sampang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terlihat apakah program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan, serta pengurangan kesenjangan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengembangan program pemberdayaan desa ke depannya.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1) Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini berkontribusi sebagai referensi dan menjadi sumber literatur yang tersedia di perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bagi Pemerintah Provinsi

Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai acuan untuk evaluasi untuk pengembangan Program Desa Berdaya sebagai program berkelanjutan serta menjadi masukan dalam perencanaan program-program di masa depan di Provinsi Jawa Timur.

3) Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini digunakan sebagai evaluasi dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya serta sebagai masukan untuk menjalankan program lain dalam upaya pembangunan desa.

4) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa, serta menilai keberhasilan program khususnya dalam Program Desa Berdaya.

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi teoritis serta memperkaya wawasan mengenai program pembangunan daerah dan desa, dengan perspektif dari desa penerima atau pelaksana yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Mengingat masih sangat jarang penelitian yang menggali terkait Program Desa Berdaya yang terbilang masih baru ini, maka harapannya penelitian ini menjadi suatu kontribusi dalam pengembangan Program Desa Berdaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*).